

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai agenda pembangunan global telah menjadi kerangka normatif yang menuntun arah kebijakan pembangunan di berbagai negara. Indonesia, sebagai bagian dari forum internasional, berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip dan tujuan *SDGs* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, tetapi juga sebagai bentuk penyelarasan dengan agenda pembangunan global. Sinkronisasi antara substansi TPB/*SDGs* dengan dokumen RPJMN menjadi hal yang krusial untuk memastikan harmonisasi tujuan pembangunan nasional dan global, sehingga dapat tercipta sinergi yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan.

RPJMN sebagai perwujudan dari Asta Cita, visi dan misi Presiden Republik Indonesia ke-8, menegaskan bahwa pencapaian target *SDGs* bukan sekadar agenda tambahan, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Badan Perencanaan & Pembangunan, 2024). Dengan demikian, komitmen pemerintah untuk menyinergikan TPB/*SDGs* dalam kebijakan pembangunan nasional menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global hingga tahun 2030 (Leontinus, 2022).



Gambar 1. 1 Tujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: SDGS UN (United Nation)

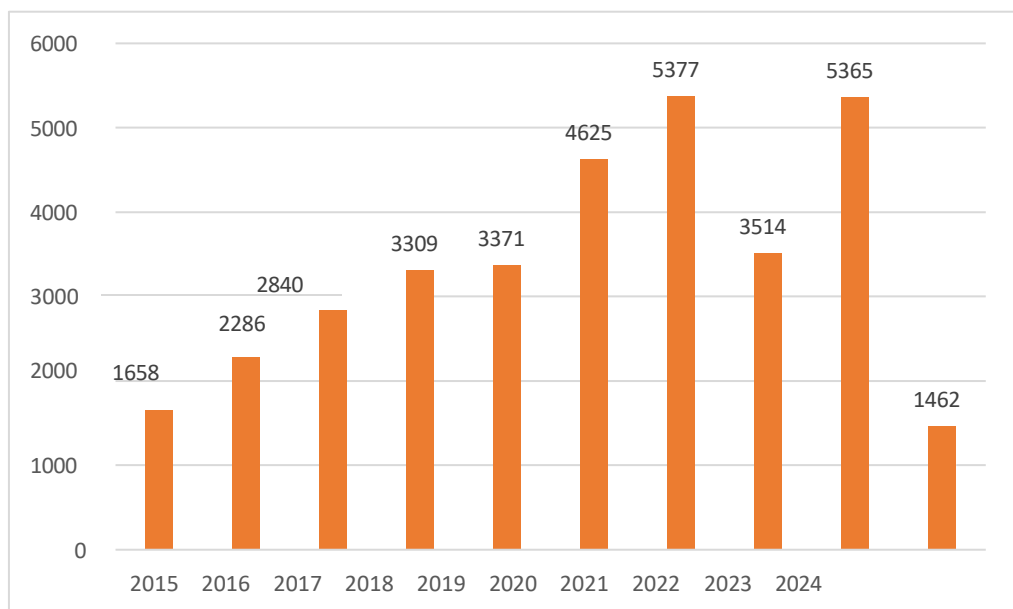
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan saat ini adalah penanggulangan bencana yang timbul akibat perubahan iklim (Fauzy *et al.*, 2019). Komitmen global terhadap isu ini tercermin secara eksplisit pada tujuan ke-13 *SDGs*, yaitu “*Climate Action*”, yang menegaskan pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan tantangan eksistensial terbesar abad ke-21, yang dampaknya tidak hanya dirasakan pada ranah lingkungan tetapi lebih dari itu, secara langsung memengaruhi dimensi sosial, ekonomi, serta politik di tingkat global (Marzuq *et al.*, 2024). Fenomena dari ancaman perubahan iklim tentunya berdampak pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan kekeringan, yang secara khusus mengancam ketahanan nasional Indonesia dalam mencapai target TPB/*SDGs*.

Realisasi dari *SDGs* ke-13 tentang penanganan perubahan iklim masih

belum berjalan dengan ideal. Pemerintah selalu berusaha untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan yang ada pada setiap tingkatan (Putri, Kismartini Kismartini, 2024). Penyelarasan strategi-strategi nasional utama, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020–2045, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), memprioritaskan pengintegrasian aksi kesehatan dan iklim ke dalam perencanaan nasional, namun yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hasil yang sebaliknya (WHO, 2025). Proyeksi iklim masa depan menunjukkan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi berpotensi mengganggu pasokan sumber daya vital, seperti air, energi, dan pangan (BPBD Jawa Tengah, 2021). Dengan demikian, penanganan risiko perubahan iklim menjadi aspek strategis yang tidak hanya menyangkut mitigasi lingkungan, tetapi juga kestabilan pembangunan nasional secara menyeluruh, sehingga diperlukan pendekatan multisektoral dan terintegrasi untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan pada berbagai tingkatan.

Bencana hidrometeorologi merupakan fenomena yang terjadi akibat anomali cuaca dan iklim di atmosfer, di mana peningkatan frekuensi dan intensitasnya diduga kuat berkaitan dengan perubahan iklim global (BMKG, 2022). Di Indonesia, variabilitas dan intensitas curah hujan atau presipitasi menunjukkan korelasi signifikan dengan kejadian bencana hidrometeorologi. Kondisi geografi dan klimatologis Indonesia yang unik menjadikannya sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi yang meliputi, meliputi banjir, banjir

bandang, kekeringan, kebakaran hutan, hujan lebat, tanah longsor, hujan es, puting beliung, serta angin kencang (Azizah *et al.*, 2022). Sebagai manifestasi nyata dari dampak negatif perubahan iklim, bencana hidrometeorologi secara langsung berkontribusi terhadap kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan, sehingga memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi dan berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat ketahanan nasional (BMKG, 2022). Hal ini dapat dilihat oleh fakta bahwa bencana yang diakibatkan perubahan iklim, seperti bencana hidrometeorologi masih marak terjadi di Indonesia, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disajikan pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/ abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan masih tinggi.



Gambar 1. 2 Data Bencana Hidrometeorologi di Indonesia Tahun 2015 – 2024

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia BNPB (data diolah oleh peneliti)

Data yang telah dilampirkan di atas dapat diketahui, bahwa tingginya tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi di Indonesia yang meliputi cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Dari jumlah bencana yang terjadi di Indonesia, sebanyak 99,34% merupakan bencana hidrometeorologi (Kompas, 2025). Banyaknya bencana hidrometeorologi juga diikuti dengan besarnya korban jiwa dan juga kerugian materi yang tidak sedikit. Pada tahun 2023 dan 2024 bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia mengakibatkan 646 orang meninggal dan kurang lebih empat juta orang mengungsi (BNPB, 2025).

Pemerintah menyadari urgensi kebijakan untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi sebagai respons terhadap tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan salah satu kebijakan penanggulangan bencana. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk menjamin agar penanggulangan bencana berjalan secara terkoordinasi dan terpadu baik di tingkat pusat maupun yang ada di tingkatan lokal. BNPB menyebutkan bahwa provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Di bawah ini merupakan data daerah dengan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi tertinggi yang meliputi bencana seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 1. 1
Daerah di Indonesia dengan Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi Tertinggi

No.	Provinsi	Tahun						Total
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jawa Barat	686	938	1.357	817	831	199	4.828
2	Jawa Tengah	923	1018	620	488	626	137	3.812
3	Jawa Timur	619	250	361	397	133	158	1.918
4	Aceh	180	360	279	222	236	69	1.346
5	Kalimantan Selatan	154	193	272	107	539	19	1.284
6	Sulawesi Selatan	164	53	185	144	267	84	1.007
7	Sumatra Barat	100	241	211	74	134	57	817
8	Sumatra Utara	70	147	173	105	216	103	814
9	Riau	58	55	148	96	259	51	667
10	Kalimantan Timur	54	115	119	46	252	14	600
11	Kalimantan Tengah	76	89	147	77	103	35	573
12	Sumatra Selatan	95	90	92	103	85	56	521
13	NTB	54	88	112	46	156	35	491
14	Sulawesi Tengah	21	53	147	99	103	63	486
15	Banten	64	96	113	79	62	28	442

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia BNPB (data diolah oleh penulis)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan angka kejadian bencana hidrometeorologi tertinggi di Indonesia. Temuan tersebut sejalan dengan data yang dipublikasikan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah melalui Laporan Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022–2026, yang mengidentifikasi Jawa Tengah sebagai wilayah dengan tingkat risiko hidrometeorologi yang tergolong tinggi. Kajian risiko bencana dilakukan sebagai instrumen analisis strategis untuk menghasilkan informasi mengenai tingkat ancaman pada suatu wilayah dengan mempertimbangkan tiga komponen utama, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Ketiga komponen tersebut dianalisis berdasarkan

parameter masing-masing untuk mendapatkan gambaran tingkat risiko yang komprehensif (BPBD Jawa Tengah, 2021). Data mengenai tingkat risiko bencana hidrometeorologi yang mencakup kejadian cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Tengah selengkapnya ditampilkan pada Tabel 1.2.

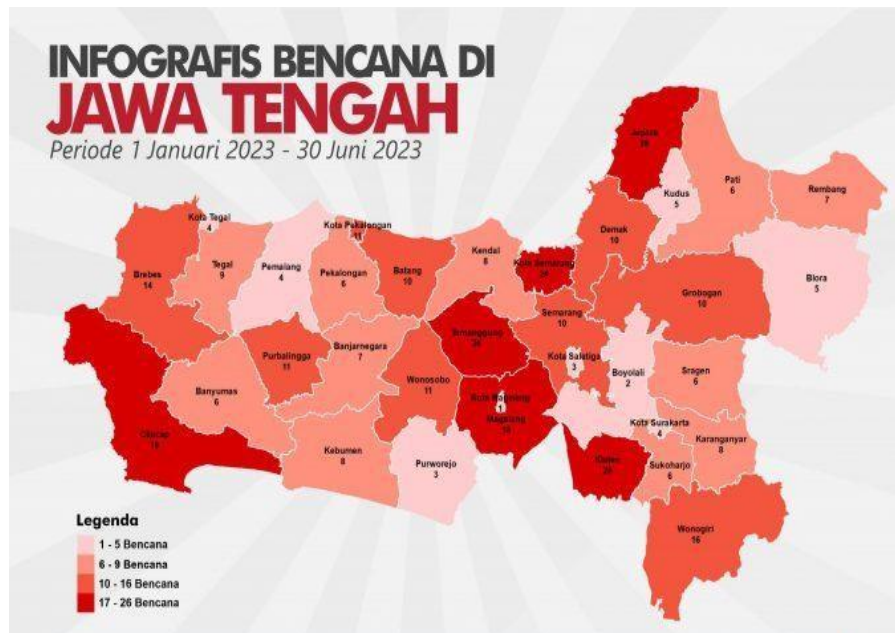
Tabel 1. 2
Potensi Bahaya Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jawa Tengah

No	Potensi Bahaya Bencana Hidrometeorologi	Bahaya Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Banjir	19.340	469.909	446.225	935.504	TINGGI
2.	Banjir Bandang	12.678	32.757	58.897	104.332	TINGGI
3.	Cuaca Ekstrem	997.704	324.567	1.510.033	2.832.304	TINGGI
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	8.891	2.282	4.532	15.705	TINGGI
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	304.437	548.759	110.135	963.331	TINGGI
6.	Kekeringan	0	2.336.056	941.051	3.227.108	TINGGI
7.	Tanah Longsor	78.622	207.458	734.693	1.020.772	TINGGI

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2026 (data diolah oleh penulis)

Laporan kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Tengah 2022-2026 yang dapat dilihat pada tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi bahaya bencana hidrometeorologi yang meliputi bencana, seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi. Ancaman bahaya dan risiko dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah salah satunya disebabkan karena kondisi geografis. Dalam kasus bencana hidrometeorologi, kerentanan Provinsi Jawa Tengah ditentukan oleh

geografi, populasi, ekonomi, dan faktor lainnya. Jika kapasitas wilayah tersebut buruk, kemungkinan terjadinya bencana akan meningkat dan berdampak signifikan (BNPB, 2021).



Gambar 1. 3 Peta Sebaran Bencana di Jawa Tengah
Sumber: BPBD Jawa Tengah, 2024

Kota Semarang adalah salah satu daerah dengan ancaman potensi bencana hidrometeorologi yang dikategorikan tinggi oleh BNPB. Bentang alam Kota Semarang yang unik, terdiri dari dataran rendah dan juga tinggi membuat ancaman bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kota Semarang. Perkembangan Kota Semarang yang pesat dan maju tentu dibarengi dengan persoalan dan masalah yang ada, salah satunya adalah semakin besarnya kapasitas yang harus dimiliki oleh Kota Semarang dalam menghadapi bencana hidrometeorologi (Wijaya *et al.*, 2023). Data potensi bahaya bencana hidrometeorologi di Kota Semarang dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3
Potensi Bahaya Bencana Hidrometeorologi di Kota Semarang

No	Potensi Bahaya Bencana Hidrometeorologi	Bahaya Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1.	Banjir	3379	7.592	3.440	11.368	TINGGI
2.	Banjir Bandang	1	10	45	55	TINGGI
3.	Cuaca Ekstrem	9.590	5.664	22.124	37.378	TINGGI
4	Gelombang ekstrem dan Abrasi	342	132	334	807	TINGGI
5	Kebakaran hutan dan lahan	3.314	2.315	0	5.629	SEDANG
6	Kekeringan	0	9.594	27.784	37.378	TINGGI
7	Tanah Longsor	945	654	3.201	4.801	TINGGI

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022 - 2026 (data diolah oleh penulis)

Tabel 1.3 yang ada di atas diketahui bahwa potensi bahaya bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kota Semarang memiliki potensi bahaya bencana yang dikategorikan tinggi oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Ancaman bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Semarang tentu menjadi perhatian bagi banyak pihak, salah satunya bagi Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang tentu mempunyai peran penting dalam rangka menanggulangi bencana hidrometeorologi. Adanya kebijakan yang digunakan sebagai payung hukum dalam sistem penanggulangan bencana, yaitu melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Selain itu, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang 2021-2026 mencantumkan penanggulangan bencana

hidrometeorologi sebagai salah satu tujuannya.

Penanggulangan bencana hidrometeorologi merupakan agenda strategis bagi Pemerintah Kota Semarang mengingat tingginya tingkat kerentanan wilayah terhadap dinamika iklim dan perubahan lingkungan. Disebutkan dalam Renstra BPBD Kota Semarang 2021-2026, bahwa Kota Semarang sekarang ini dihadapkan dengan tantangan bencana, berupa anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (*global warming*). Lebih lanjut lagi, dalam Renstra BPBD Kota Semarang tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa masih terdapat tantangan yang menghambat sistem penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang, seperti keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya fisik maupun sumber daya non fisik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, dalam Renstra juga disebutkan bahwa, belum terpadunya koordinasi antar lembaga lintas sektor tentu akan menghambat sistem penanggulangan bencana hidrometeorologi yang ada di Kota Semarang.

Seperti yang sudah disampaikan pada tabel 1.3 sebelumnya, bahwa Kota Semarang memiliki ancaman yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Tentu dengan tingginya ancaman bencana dan adanya tantangan yang menghambat sistem penanggulangan bencana yang ada, seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan, Pemerintah Kota Semarang beserta banyak pihak perlu melakukan upaya perbaikan dalam sistem penanggulangan bencana yang ada. Di mana sistem penanggulangan bencana yang bisa menjawab permasalahan yang ada. Dalam konteks ini,

diperlukan suatu pendekatan tata kelola yang tidak hanya responsif, tetapi juga bersifat adaptif dan antisipatif terhadap ketidakpastian, yaitu melalui penerapan *dynamic governance* (tata kelola pemerintahan yang dinamis). Konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan, kemampuan belajar institusi, serta mekanisme adaptasi yang berkelanjutan terhadap perubahan sosial, lingkungan, maupun teknologi (Marzuq *et al.*, 2024). Pendekatan yang dinamis dan juga adaptif terhadap perubahan lingkungan tentu sangat dibutuhkan ketika menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian, seperti dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

Tata kelola pemerintahan yang dinamis menuntut pemerintah untuk selalu berpikir dinamis, salah satunya untuk selalu bersikap dan berpikir secara dinamis dalam menghadapi situasi yang tidak pasti, salah satunya menghadapi bencana. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa: “*Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.*” Pernyataan tersebut tentu sesuai dengan, gagasan yang disampaikan oleh Neo dan Chen. Dalam bukunya, mereka menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang fungsi pemerintah dalam menjalankan hukum dan menawarkan layanan publik di dunia yang terus berkembang dan penuh dengan rintangan karena perubahan lingkungan dan sosial yang bergerak sangat cepat. Karena keadaan yang tidak

dapat diprediksi ini, pemerintah harus terus menerus membuat aturan yang memungkinkannya untuk berkolaborasi dan menggunakan semua sumber dayanya.

Penanggulangan bencana hidrometeorologi dengan pendekatan *dynamic governance* menjadi isu strategis bagi Pemerintah Kota Semarang, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi BPBD, yang menegaskan peran BPBD dalam seluruh tahapan manajemen bencana di wilayah Kota Semarang. Penerapan pendekatan *dynamic governance* diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis pembelajaran, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta mendorong respons kebencanaan yang responsif terhadap dinamika risiko, berkelanjutan, dan berorientasi pada ketangguhan daerah.

Kemunculan model *dynamic governance* secara konseptual diawali dengan adanya fenomena konsep tata kelola pemerintahan yang terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ini menunjukkan bahwa para praktisi akan terus mengajukan ide-ide yang lebih unggul dari paradigma tata kelola yang selama ini ada. Sebagai ilustrasi perbandingan gagasan yang berkaitan dengan model tata kelola yang ada, yaitu model *good governance*, di mana pada model ini merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditunjukkan dengan adanya pemerintahan yang terbuka (demokratis) dan pelibatan peran

aktif masyarakat dalam pemerintahan. Kemudian juga terdapat konsep tata kelola pemerintahan *sound governance* di mana pada konsep ini memberi penekanan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dengan dunia luar (internasional). Selain itu ada konsep *open governance*, yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas pada setiap kegiatan (Mandasari, 2023).

Sementara itu, konsep *dynamic governance* menempatkan perhatian utama pada kemampuan pemerintah dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang bersifat cepat, kompleks, dan sulit diprediksi. Konsep ini pada dasarnya berupaya mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dengan program dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat statis tetapi responsif terhadap dinamika kondisi sosial, ekonomi, maupun ekologis (Wialdi *et al.*, 2022). Implementasi *dynamic governance* diharapkan mampu menghasilkan transformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada wilayah yang menghadapi tekanan perubahan lingkungan yang signifikan. Konteks ini sangat relevan bagi Kota Semarang, mengingat meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi sebagai konsekuensi dari perubahan iklim telah menciptakan pola risiko baru yang berkembang secara cepat dan tidak linear. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong perubahan orientasi penyelenggaraan pemerintahan, dari sekadar menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, menuju model tata kelola yang adaptif, antisipatif, serta mampu merespons kebutuhan publik secara berkelanjutan (Martoyo & Sihalo, 2021).

Konsep *dynamic governance* hadir sebagai pendekatan tata kelola modern yang memungkinkan pemerintah beradaptasi secara efektif terhadap perubahan lingkungan yang cepat, tidak pasti, dan penuh kompleksitas terlebih pada era perubahan iklim dan tantangan *VUCA* (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Konsep ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Pilar *thinking ahead* menekankan kemampuan antisipatif pemerintah dalam merumuskan strategi yang visioner dan adaptif terhadap kemungkinan perubahan bencana yang ada di Kota Semarang di masa depan. Sementara itu, *thinking again* merepresentasikan kapasitas reflektif dalam mengevaluasi, mengoreksi, serta menyempurnakan kebijakan dan program secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika situasi penanggulangan bencana di Kota Semarang. Adapun *thinking across* berfungsi sebagai landasan pembelajaran lintas sektor dan wilayah, di mana pemerintah mengadopsi dan mengadaptasi praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai konteks untuk mendorong inovasi dan efektivitas tata kelola penanggulangan bencana yang terbaik dan bisa diterapkan di wilayahnya (Putra *et al.*, 2025). Untuk mendukung hal tersebut, penanggulangan bencana membutuhkan sistem dan sumber daya manusia, komitmen, dan juga pola pikir pragmatis yang dapat mendorong *dynamic governance* supaya berfungsi secara optimal sesuai dengan kapasitasnya (Mayarni, 2019).

Guna mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang baik, optimal dan juga berkelanjutan maka perlu dilihat bagaimana sumber daya yang dimiliki. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan

penerapan dari *dynamic goverenanca*, baik itu sumber daya fiisik maupun non fisik (Maryani, 2019). Bukan menjadi rahasia umum bahwa manajemen bencana membutuhkan sumber daya yang memadai berdasarkan tingkat keparahan dan sifat kejadian. Oleh karena itu, sumber daya yang diperlukan untuk mengelola bencana di lingkungan spesifik mereka harus disediakan oleh manajemen puncak atau kepemimpinan (Crosweller, 2022). Kebutuhan sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *dynamic goverenance* salah satunya juga dalam penanggulangan bencana. Lebih lanjut lagi tahap manajemen bencana yang baik, terlebih dahulu harus mampu memetakan dan melakukan identifikasi terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan penanggulangan bencana (Buchari, 2020).

Maka berdasarkan fenomena teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan analisis apakah langkah dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penanggulangan bencana hidrometeorologi telah mengadopsi desain *dynamic governance*. Analisis ini penting untuk menilai apakah praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diterapkan telah mencerminkan karakteristik pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan risiko. Lebih lanjut, penerapan konsep *dynamic governance* berpotensi menjadi terobosan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas proses penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang, sehingga mampu meningkatkan ketangguhan daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya melihat penanggulangan bencana pada tahap pra bencana saja. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini berusaha untuk membedah dari tahapan pencegahan hingga tahap penanggulangan bencana hidrometeorologi. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini, yaitu teori yang dikemukakan oleh Neo & Chen menyatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang dinamis dapat dilihat ketika bagaimana pemerintah melakukan tindakan pencegahan hingga adanya tindakan kontinuitas dalam menghadapi keadaan atau fenomena yang menyebabkan munculnya *uncertain future*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul: **“Analisis *Dynamic Governance* dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Kota Semarang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada, antara lain:

1. Ancaman bahaya bencana hidrometeorologi di Kota Semarang dikategorikan tinggi oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.
2. Masih adanya tantangan dan kendala dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang, seperti kurangnya sumber daya fisik maupun non-fisik baik dari segi kuantitas dan juga kualitasnya.
3. Koordinasi antar lembaga yang belum terpadu dalam sistem

penanggulangan bencana di Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan adanya temuan bahwa tingginya ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di Kota Semarang, maka dibutuhkan sistem penanggulangan bencana hidrometeorologi yang dinamis. Di mana pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang adaptif dalam menangani permasalahan bencana hidrometeorologi ini. Selanjutnya berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor yang mendorong dan menghambat *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi mengenai penerapan konsep *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di Kota Semarang. Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu dalam menganalisis peran pemerintah mengenai hidrometeorologi, serta menjadi tolok ukur kebijakan di masa mendatang. Hal tersebut karena ancaman dari perubahan iklim yang sudah bisa dirasakan dampaknya sekarang ini dan Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari perubahan iklim. Kemudian bagi civitas akademika, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pustaka dalam melaksanakan penelitian yang relevan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Harapannya adalah memberikan manfaat serta memperluas pemahaman ilmiah dan pengetahuan penelitian dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena maupun permasalahan terkait penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang yang ditinjau dari tata kelola pemerintahan yang

dinamis atau *dynamic governance*.

2. Bagi Masyarakat Harapannya dengan penelitian ini bisa menemukan suatu cara dalam mewujudkan penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Selain itu, dapat menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap krisis iklim.
3. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang, terutama kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.

1.6 Kerangka Penelitian Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Alim Alim, (2022), mengenai penerapan *dynamic governance* dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk menganalisis kesiapan institusi dalam mewujudkan tata kelola yang adaptif melalui penguatan elemen budaya organisasi (*culture*) dan kapabilitas institusional (*capabilities*), yang mencakup dimensi *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Menggunakan kerangka teori *dynamic governance* yang dikembangkan oleh Neo dan Chen (2007), penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik manajerial dan dinamika implementasi kebijakan yang berlangsung dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa gagasan *thinking again* dan *thinking across* telah diimplementasikan secara cukup efektif, tercermin melalui adanya evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan layanan. Namun demikian, penerapan *thinking ahead* belum dapat dioptimalkan secara maksimal, disebabkan oleh ketimpangan kompetensi aparatur serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju tata kelola yang dinamis masih memerlukan penguatan kapasitas internal dan strategi pengembangan SDM yang lebih terstruktur.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Dinda Kalpika Putri & Putri, (2023), mengenai penerapan *dynamic governance* pada Program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat (DAMAKESMAS) bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola program tersebut melalui perspektif teori *dynamic governance*. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, kajian ini menggunakan kerangka konseptual *dynamic governance* yang dikembangkan oleh (Neo dan Chen 2007). Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika implementasi DAMAKESMAS melalui pemetaan elemen kapabilitas adaptif dan mekanisme pengelolaan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan DAMAKESMAS telah sejalan dengan prinsip-prinsip *dynamic governance*, terutama dalam merespon tantangan perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung secara cepat, sehingga menuntut adanya adaptasi kebijakan dan respons

operasional yang progresif. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala teknis maupun struktural. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rusli, (2022) membahas penerapan *dynamic governance* dalam penyelenggaraan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana prinsip tata kelola pemerintahan dinamis diterapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Sejalan dengan studi terdahulu, penelitian ini menggunakan kerangka teori *dynamic governance* dari Neo dan Chen (2007) sebagai landasan analisis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berupaya menggambarkan dinamika dan realitas pelaksanaan program KLA secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *dynamic governance* dalam penyelenggaraan program KLA di Kota Pekanbaru tergolong cukup baik, dimana ketiga elemen utama yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* telah diimplementasikan secara proporsional. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya faktor penghambat, terutama rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi maupun pelaporan, sehingga masih diperlukan strategi peningkatan kolaborasi dan kesadaran publik untuk mengoptimalkan keberlanjutan program.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini *et al.*, (2023) berfokus pada penerapan *dynamic governance* dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana prinsip tata kelola pemerintahan dinamis diterapkan dalam proses pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Menggunakan kerangka teori *dynamic governance* dari (Neo dan Chan 2007), penelitian ini menelaah empat komponen utama, yaitu *culture*, *capability*, *able people*, dan *agile processes*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, termasuk strategi adaptif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bone belum sepenuhnya memenuhi karakteristik *dynamic governance*. Namun demikian, beberapa aspek tata kelola menunjukkan kemajuan yang mengarah pada implementasi tata kelola yang lebih adaptif, responsif, dan inovatif, sehingga secara keseluruhan pelayanan tersebut dapat dikategorikan berada pada tahap transisi menuju *dynamic governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riyoldi *et al.*, 2022) yang membahas tentang *dynamic governance* dalam implementasi kebijakan inovasi pelayanan pada Disdukcapil Kota Pontianak yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi

kebijakan inovasi pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pontianak. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori *dynamic governance* (Neo & Chen, 2007). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan data yang dianggap relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan administrasi di Disdukcapil Kota Pontianak telah cukup untuk dikatakan dinamis dalam tata kelola kerja baik itu dari aktivitas pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi/penerapan. Saran membuat SOP resmi dan disosialisasikan dengan memberdayakan melalui Kelurahan hingga RT/RW, rekrutmen sumber daya pelaksana bidang TI, pelatihan TI terhadap pegawai yang ada, konsistensi monitoring dan evaluasi, pemeliharaan server *website* secara berkala dan tingkatkan kecepatan internet Kantor jika perlu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Yanuar *et al.*, 2023) yang membahas tentang penerapan *dynamic governance* terhadap tata kelola permukiman di Kota Depok tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai dinamika Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan tata kelola permukiman untuk menghadapi dampak urbanisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo dan Chen, 2007) yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *culture*, *capabilities* dan *change*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tingginya urbanisasi yang dilakukan oleh Pemkot Depok menghasilkan perubahan yang positif. Sehingga didapati kebijakan yang adaptif dan tercipta seperti menetapkan harga rumah subsidi sederhana yang disesuaikan dengan penghasilan kaum urban.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ikhlas *et al.*, 2022) membahas tentang implementasi *dynamic governance* yang dilakukan oleh Desa Sanur Kaja dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Sanur Kaja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007) dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel kapasitas, yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* yang dipengaruhi oleh dua elemen pengungkit, *able people* dan *agile process* serta variabel pendukung *change*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan telah menjawab tentang implementasi *dynamic governance* dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa Sanur Kaja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wialdi *et al.*, 2022) yang membahas tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkot Padang dalam penanganan Covid-19 melalui konsep *dynamic governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *dynamic governance* dalam menghadapi Covid-19 di Kota Padang. Teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007) dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel kapasitas, yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* yang dipengaruhi oleh dua elemen pengungkit, *able people* dan *agile process*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat variabel dan indikator teori *dynamic governance* yang masih belum terpenuhi koordinasi antar lembaga yang berkolaborasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nashrul *et al.*, 2023) yang membahas tentang *dynamic governance* dalam pembangunan pariwisata di Kecamatan Rupat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *dynamic governance* dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis serta menganalisis faktor penghambat dan juga pendorong *dynamic governance*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007) dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel *capacity* saja, yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Peneliti tidak menambahkan elemen pengungkit dari *capacity*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam konteks *dynamic governance* dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat didasari dengan penyusunan perda tersebut dapat menjadi acuan dan indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkalis khususnya Pulau Rupat.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Budiman *et al.*, 2022) yang membahas tentang kapabilitas *dynamic governance* dalam pembangunan inovasi pemerintahan di Kabupaten Bintan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pemerintah Kabupaten Bintan melakukan kebijakan adaptif melalui pendekatan kapabilitas *dynamic governance* dalam membangun ekosistem inovasi pemerintahan secara berkelanjutan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007) dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel capacity saja, yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori keberhasilan inovasi yang dikemukakan oleh (Tarigan 2020) dalam menganalisis keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan apa saja upaya pemerintah di dalam memastikan masa depan inovasi melalui jalinan kerja sama bersama perguruan tinggi sebagai fasilitator sekaligus mengevaluasi perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Bintan untuk indeks inovasi daerah.

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh perbandingan serta rujukan yang relevan dalam memperkaya teori dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu dalam memosisikan penelitian dalam konteks yang lebih luas serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Melalui penentuan

referensi penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi batasan melalui parameter dari ruang lingkup penelitian sebelumnya. Penelitian yang dikaji ini difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan penerapan *dynamic governance* dalam menanggulangi bencana hidrometeorologi.

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai pedoman atau acuan dalam mengkaji informasi yang masih relevan terhadap permasalahan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Alim, 2022), (Anggraini *et al.*, 2023) dan (Riyoldi *et al.*, 2022) memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu terkait dengan penerapan *dynamic governance* dalam bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kota/ Kabupaten. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ketiga penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan teori *dynamic governance* yang berasal dari (Neo & Chen, 2007). Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Alim, 2022) menggunakan dua elemen yang ada pada teori *dynamic governance*, yaitu *culture* dan *capabilities* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini *et al.*, 2023) dan (Riyoldi *et al.*, 2022) hanya melihat pada elemen *capabilities* saja dengan menggunakan 3 variabel *thinking ahead*, *thinking across* dan *thinking again*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wialdi *et al.*, 2022) dan (Ikhlas *et al.*, 2022) memiliki fokus penelitian yang sama, yaitu penerapan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana Covid-19. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu deskriptif

kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan teori *dynamic governance* (Neo & Chen, 2007) kedua penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan *dynamic governance* dalam menghadapi Covid-19. Namun, yang menjadi pembeda dalam penelitian tersebut terletak pada lokus penelitian, yaitu penanggulangan Covid-19 di daerah Bali dan di Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nashrul *et al.*, 2023) dan (Budiman *et al.*, 2022) menggunakan teori *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo dan Chen, 2007) kedua penelitian tersebut juga hanya berfokus pada variabel *capabilities* yang meliputi *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Nashrul, 2022) memadukan teori *dynamic governance* dengan teori keberhasilan inovasi yang dikemukakan oleh (Tarigan, 2020) dalam menganalisis keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Penelitian yang dilakukan (Ni Putu Dinda Kalpika Putri & Putri, 2023), (Sari & Rusli, 2022) dan (Yanuar *et al.*, 2023) berfokus pada dinamika pemerintahan dalam implementasi suatu kebijakan maupun program yang ada di suatu daerah Kabupaten/Kota. Ketiga penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut juga menggunakan teori *dynamic governance* yang dicetuskan oleh (Neo & Chen, 2007). Namun, yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh (Yanuar *et al.*, 2023) menggunakan ketiga elemen yang ada pada teori *dynamic governance*, yaitu

culture, capabilities dan *change*. Elemen *change* yang digunakan dalam penelitian (Yanuar *et al.*, 2023) digunakan sebagai alat ukur dalam mengukur perubahan yang ada pada kebijakan tata kelola permukiman akibat adanya urbanisasi di Kota Depok. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, diketahui bahwa *dynamic governance* sangat penting bagi pemerintahan dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang ada di masa mendatang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan, peneliti menemukan perbedaan mendasar pada topik yang diangkat. Penelitian-penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh (Anggraini *et al.*, 2023), (Riyoldi *et al.*, 2022), (Ni Putu Dinda Kalpika Putri & Putri, 2023), (Sari & Rusli, 2022) dan (Wialdi *et al.*, 2022) lebih banyak membahas penerapan *dynamic governance* hanya berfokus pada elemen *capabilities* saja, yang meliputi indikator *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* tanpa melihat indikator pengungkutnya, yaitu *able people* dan *agile process*. Selain itu penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas penerapan *dynamic governance* pada fenomena administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten/Kota.

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk menganalisis *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Semarang. Penelitian ini akan berfokus untuk membahas *dynamic governance* pada elemen *capabilities* yang terdiri dari tiga pola pikir utama (*thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*). Selain itu,

peneliti juga akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pendorong dan juga penghambat design tata kelola pemerintahan yang dinamis (*dynamic govenrnance*) dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.

Bukan tanpa alasan menurut peneliti untuk menerapkan konsep *dynamic governance* dalam tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya dengan melihat elemen *dynamic capabilities* saja, diperlukan juga faktor lain, seperti faktor pendorong dan juga faktor penghambat dalam desain tata kelola pemerintahan yang dinamis. Belum banyak penelitian terkait permasalahan yang akan peneliti teliti dan masih banyaknya keterbatasan penelitian terdahulu yang memfokuskan konsep *dynamic governance*. Hal ini tentu menjadi peluang bagi peneliti untuk melakukan dan mengidentifikasi secara menyeluruh konsep *dynamic governance* yang dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007), khususnya pada topik dan fenomena yang diteliti, terkait dengan sistem penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Meskipun terdapat kesamaan metode dan teori dengan beberapa penelitian sebelumnya. Namun adanya unsur kebaruan dalam lokus penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan penelitian untuk masa yang akan datang.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah usaha untuk membangun kehidupan demokratis yang dipercaya oleh masyarakat, administrasi publik

didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, di mana pelayanan publik mengintegrasikan individu berdasarkan nilai-nilai seperti legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keteladanan, transparansi, dan keterlibatan C.T. Goodsell dalam (Keban, 2019). Selain itu, administrasi publik menurut Chandler dan Plano, 1988 dalam (Keban, 2019) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diatur dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwasanya ilmu administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan untuk mengatur hubungan masyarakat *public affairs* dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dalam bukunya (Keban, 2019) juga menyatakan bahwasanya hadirnya ilmu administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan dan penyempurnaan terutama pada lingkup sumber daya manusia, keuangan dan juga organisasi.

Dalam kaitannya dengan pengertian dari administrasi publik, menurut Sharitz dan Russel, 1997 dalam (Keban, 2019) mereka memberikan pernyataan bahwa sulit untuk mendefinisikan administrasi publik yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab mereka memberikan definisi administrasi publik berdasarkan empat kategori, antara lain:

1. Politik

Administrasi publik dalam pandangan politik diartikan *sebagai* “*what*

government does” artinya apa yang dikerjakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu siklus tahapan kebijakan publik, sebagai bentuk penerapan dari *public interest*, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

2. Legal/ Hukum

Administrasi publik dalam kacamata hukum atau legal dapat diartikan sebagai penerapan hukum (*law in action*), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa atau “raja” kepada rakyatnya, dan sebagai bentuk “pengambilan paksa” terhadap kaum borjuis guna dibagikan kepada kaum poorletar, yang mana pada posisi ini pihak kaya atau borjuis merasa dirugikan karena harus tunduk dan menaatinya.

3. Manajerial

Administrasi publik dalam kacamata manajerial dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain) selain itu bentuk akal-akalan untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar tetapi dengan hasil yang kecil, dan sebagai seni bukan ilmu.

4. Mata Pencarian

Administrasi publik dalam kacamata profesi dipandang sebagai suatu bentuk profesi (okupasi) mulai dari pekerjaan yang paling ringan sampai dengan berat di sektor publik di mana semua itu adalah bagian

dari administrator publik.

Banyaknya sudut pandang mengenai administrasi publik, tergantung dari cara orang melihat kata “administrasi publik” itu sendiri (Keban, 2019). Perkembangan ilmu administrasi publik terus mengalami perkembangan. Perkembangan ilmu administrasi publik muncul dari teori dan paradigma yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Thomas S. Kuhn, paradigma adalah nilai, prinsip, perspektif, atau pendekatan pemecahan masalah yang dianut oleh sebuah komunitas pada saat tertentu (Dwiyanto, 2022). Paradigma sangat bermanfaat bagi administrasi publik karena memungkinkan untuk mengidentifikasi titik fokus dan lokus administrasi publik.

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi Publik (1900-1926)

Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam mencetuskan paradigma ini, antara lain Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul *"Politics and Administration"* menjelaskan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan pada administrasi publik dituntut untuk memfokuskan pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan juga administrasi ditujukan dengan pemisahan antara badan eksekutif yang berperan sebagai pelaksana dari kebijakan, sedangkan lembaga yudikatif yang berperan untuk melakukan perumusan 35 kebijakan yang ada. Lembaga yudikatif

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga bekerja sama dengan badan legislatif dalam menentukan arah kebijakan dan merumuskan kebijakan. Dampak dari adanya dikotomi antara administrasi dengan politik adalah, administrasi harus dilihat sebagai suatu bebas nilai, dan diarahkan pada nilai efisiensi dan ekonomi birokrasi. Kekurangan yang ada dalam paradigma ini adalah hanya menekankan pada aspek lokusnya saja, tanpa memperhatikan fokus dan metode yang dikembangkan dalam *government bureaucracy* (Keban, 2019).

2. Paradigma 2 (1927-1937)

Paradigma ini dikenal dengan sebutan “Prinsip-prinsip Administrasi”. Salah satu tokoh yang terkenal dalam perkembangan paradigma ini adalah Willoughby yang mana dipengaruhi juga oleh tokoh-tokoh manajemen klasik, seperti Fayol dan Taylor. Paradigma ini mulai memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus dari administrasi publik. Salah satu prinsip manajemen yang terkenal dalam perkembangan paradigma ini adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang mana prinsip manajemen ini dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Pada paradigma ini sudah mengenal yang namanya fokus, sedangkan untuk lokusnya sendiri, mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip manajemen tadi dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja dalam (Keban, 2019).

3. Paradigma 3 (1950-1970)

Paradigma administrasi negara dikenal sebagai administrasi politik. Tokoh yang terkenal dalam perkembangan paradigma ini adalah Morstein-Marx yang mana dalam bukunya yang berjudul "*Elements of Public Administration*" mulai mempertanyakan esensi dari adanya pemisahan administrasi publik dengan ilmu politik. Simon mulai mengarahkan kritiknya terhadap ilmu administrasi yang dirasa tidak konsisten dan merasa bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Ilmu administrasi negara dianggap bukan suatu *value-free* seperti yang telah dibahas pada paradigma sebelumnya, tetapi ilmu administrasi dipandang bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Akibat dari adanya pertentangan nilai ini John Gaus dalam (Keban, 2019) menyatakan bahwa ilmu administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Hal tersebut kenyataannya membawa dampak buruk bagi administrasi publik pada masa itu, karena fokus dari administrasi publik menjadi kabur dan terdapat banyak kelemahan. Bercampurnya fokus yang dimiliki oleh ilmu administrasi publik dengan ilmu politik ini, pada akhirnya ilmu administrasi publik mengalami krisis identitas karena dominasi yang dimiliki oleh ilmu politik (Keban, 2019).

4. Paradigma 4 (1956-1970)

Paradigma ini memandang ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Pada paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang

pernah populer sebelumnya dikembangkan lebih lanjut pada mas ini. Fokus dari paradigma ini mulai lebih luas lagi, yaitu berorientasi pada ilmu perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh ilmu psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus pada paradigma ini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik (Keban, 2019)

5. Paradigma 5 (1970- 1990)

Paradigma yang mengenal ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik mulai memiliki fokus dan lokus yang jelas. Paradigma ini berfokus pada teori organisasi, ilmu manajemen dan ilmu kebijakan publik. Sedangkan lokus yang dimiliki dalam paradigma ini adalah masalah-masalah publik Nicholas Henry dalam (Keban, 2019) Hal ini mengakibatkan pergeseran dari model administrasi publik konvensional ke model NPM. Kemudian, dari anggapan lain dari administrasi publik tradisional yaitu seperti klaim birokrasi Weberian sebagai struktur yang paling tepat untuk administrasi yang efektif semuanya ditentang oleh paradigma ini.

6. Paradigma 6 (1990-Sekarang)

Paradigma ini dikenal dengan julukan *governance*. *Governance* bisa diartikan sebagai kata pengganti “pemerintahan” atau untuk merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sektor privat,

masyarakat dan sebagainya. Gibson dalam (Keban, 2019) juga berpendapat bahwa pemerintah melibatkan kemitraan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mencakup masyarakat lokal, organisasi pelayanan masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta.

Pada penelitian ini akan berfokus dengan menerapkan paradigma administrasi publik yang ke-enam, yaitu paradigma *governance*. Bukan tanpa alasan, penggunaan paradigma ke-enam sebagai fokus dari penelitian ini karena dalam paradigma ini berfokus pada mekanisme dan juga proses di mana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, melakukan mediasi perbedaan-perbedaan dan juga menjalankan hak dan kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan konsep *dynamivic governance*, yang mana dalam menjalankan negaranya, pemerintah tidak berperan sebagai aktor tunggal, melainkan ada peran serta dari masyarakat maupun kelompok lain yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa paradigma *governance* ini berusaha untuk memperkuat interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam menyukseskan dan mempromosikan *people centered development*. Selaras dengan topik penelitian yang peneliti lakukan, di sini peneliti berusaha untuk melakukan analisis dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi yang dilakukan oleh Kota Semarang dengan menggunakan konsep *dynamic governance*. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana hidrometeorologi Pemerintah Kota Semarang tidak menjadi aktor tunggal, tentunya dalam kegiatan

penanggulangan bencana ini terdapat Pemerintah Kota Semarang juga melibatkan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana ini, seperti masyarakat dan juga pihak swasta. Tentunya pelibatan *stakeholders* lain dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi dan mewujudkan *people centered development*, sesuai dengan paradigma keenam administrasi publik, yaitu *governance*.

1.6.3 Manajemen Publik

Terdapat beberapa dimensi yang mewarnai keberlangsungan dari ilmu administrasi publik, salah satunya adalah dimensi manajemen. Dimensi manajemen ini berfokus pada bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Dwiyanto, 2022). Dimensi ini memusatkan perhatiannya pada penerapan implementasi berupa penerapan model, teori, metode, teknik, serta cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Danovan dan Jackson dalam (Dwiyanto, 2022) menjabarkan bahwa manajemen adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian ketrampilan (*skills*) dan juga bisa dianggap sebagai serangkaian tugas.

Dalam perkembangan pada dimensi, lahirlah tipe manajemen yang membahas secara khusus manajemen instansi pemerintah yang dikenal dengan istilah “manajemen publik”. Overman dalam (Dwiyanto, 2022) menjelaskan bahwa manajemen publik bukanlah *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi olehnya. Selain itu, manajemen publik juga tidak bisa dianggap sebagai “*policy analysis*” maupun

“administrasi publik baru”, atau bahkan kerangka yang lebih baru. Namun, manajemen publik, di sini lebih merefleksikan tekanan-tekanan antara *rational-instrument* pada satu pihak dan orientasi politik yang ada pada pihak yang berseberangan atau lain. Dalam tulisannya (Dwiyanto, 2022) mengasumsikan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, seperti *POAC* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan politik di sisi lain.

Lebih lanjut lagi, pendapat Overman dalam (Dwiyanto, 2022) beranggapan bahwa manajemen publik (*public management*) dan kebijakan publik (*public policy*) merupakan dua bidang yang ada di dalam administrasi publik dan saling tumpang tindih. Untuk melakukan diversifikasi yang ada dalam bidang tersebut, dikemukakan bahwa manajemen publik (*public management*) merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh. Sedangkan *public policy* merepresentasikan sebagai otak dan saraf. Dapat ditarik benang merah bahwa manajemen publik sendiri menekankan pada pengelolaan sumber daya baik manusia maupun non-manusia, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari kebijakan publik.

J. Steven Ott Albert C., Hyde (Dwiyanto, 2022) dalam berpendapat bahwa ilmu manajemen publik ini juga mengalami masa transisi dengan beberapa isu penting yang akan menantang, antara lain:

1. Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberlakukan pelayanan publik

2. Rasionalisasi dan akuntabilitas
3. Perencanaan dan kontrol
4. Keuangan dan pengangguran
5. Produktivitas sumber daya manusia.

1.6.4 Governance

Governance dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta G. Shabbir Cheema dalam (Keban, 2019). Dalam paradigma ini berfokus pada mekanisme dan juga proses di mana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, melakukan mediasi perbedaan dan juga menjalankan hak dan kewajibannya. Peran pemerintah di sini diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta di sini berperan sebagai supporter bagi pemerintah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan publik atau masyarakat berperan sebagai penyelenggara interaksi sosial dan politik secara sehat. Dapat disimpulkan bahwa paradigma *governance* ini berusaha untuk memperkuat interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam menyukseskan dan mempromosikan *people centered development*.

Governance sekarang ini mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan UNDP dengan lahirnya istilah yang kita kenal sekarang ini adalah “*good governance*”. Karakteristik yang dimiliki

oleh *good governance* menurut Rodinelli dalam (Keban, 2019), antara lain:

1. *Participation*
2. *Rule of law*
3. *Transparancy*
4. *Responsivness*
5. *Consensus orientation*
6. *Equity*
7. *Effectiveness and eficiency*
8. *Accountability*
9. *Strategic vision,*

Governance didefinisikan sebagai proses, praktik, dan tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat serta pihak swasta dalam merumuskan maupun memutuskan suatu kebijakan. Pada konsep *governance*, peran pemerintah tidak selalu mendominasi dalam perumusan kebijakan karena konsep *governance* melibatkan peran dari masyarakat maupun peran swasta dalam mewujudkan suatu program dan kebijakan (Keban, 2019).

Pemahaman lain terkait *governance* juga dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007) yaitu:

“Penetapan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih secara bersamaan menjadi pendorong untuk memudahkan korelasi ke arah kemajuan di berbagai bidang termasuk kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik.”

Definisi terkait *governance* menggambarkan tentang tata kelola pemerintahan yang melibatkan antara masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam penetapan suatu kebijakan maupun program. Dari pemahaman tersebut berkembang menjadi istilah *good governance* yang memiliki arti sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Berlandaskan dari pemahaman *good governance* kemudian berkembang menjadi konsep *dynamic governance* atau pemerintahan yang dinamis sebagai sebuah strategi untuk menghadapi perkembangan zaman, percepatan globalisasi dan perubahan lingkungan yang begitu cepat (Azaria, 2023). Dalam menghadapi percepatan globalisasi dan perubahan lingkungan yang begitu cepat, seperti yang terjadi sekarang ini tentu dibutuhkan sebuah kemampuan dinamis untuk melakukan sebuah perubahan yang berkelanjutan.

1.6.5 *Dynamic governance*

Konsep *good governance* akhir-akhir ini dianggap sebagai suatu konsep yang benar dalam suatu negara demokrasi (terutama dalam kajian administrasi publik) yang digunakan untuk mengelola dan menata pemerintahan yang baik (Mandasari, 2023). *Good governance* kemudian berkembang menjadi konsep *dynamic governance* yang dikenal dengan pemerintahan yang dinamis. Konsep ini digunakan sebagai sebuah strategi untuk menghadapi percepatan globalisasi dan juga kemajuan teknologi, atau yang saat ini dikenal dengan era *VUCA* (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Dalam menghadapi perubahan yang cepat tersebut, dibutuhkan kemampuan dinamis untuk melakukan sebuah perubahan yang berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan kini kian berubah

seiring dengan kondisi lingkungan yang tidak menentu, kompleks, dan penuh ketidakpastian, sehingga diperlukan pendekatan dinamis untuk menanggapi tantangan tersebut (Colm *et al.*, 2020).

Kemudian dari makna *governance* tersebut, (Neo & Chen 2007) menguraikan tentang *dynamic governance* sebagai:

“Bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidak tentuan serta perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat.”

Dinamisme di dalam lembaga atau instansi pemerintah dapat terlihat dari munculnya berbagai pandangan tentang suatu ide baru yang bersifat berkelanjutan dan dapat beradaptasi secara terus menerus melalui inovasi yang canggih, sehingga konsep dinamis di dalam pemerintahan berguna untuk menyesuaikan instansi dengan kondisi yang ada serta mendorong perbaikan dan pembelajaran yang berkesinambungan. Tentunya dinamisme di dalam pemerintahan tidak dapat muncul secara spontanitas, melainkan ada usaha dari pemimpin yang revolusioner dalam menyusun rancangan kebijakan maupun program untuk mencapai tujuan.

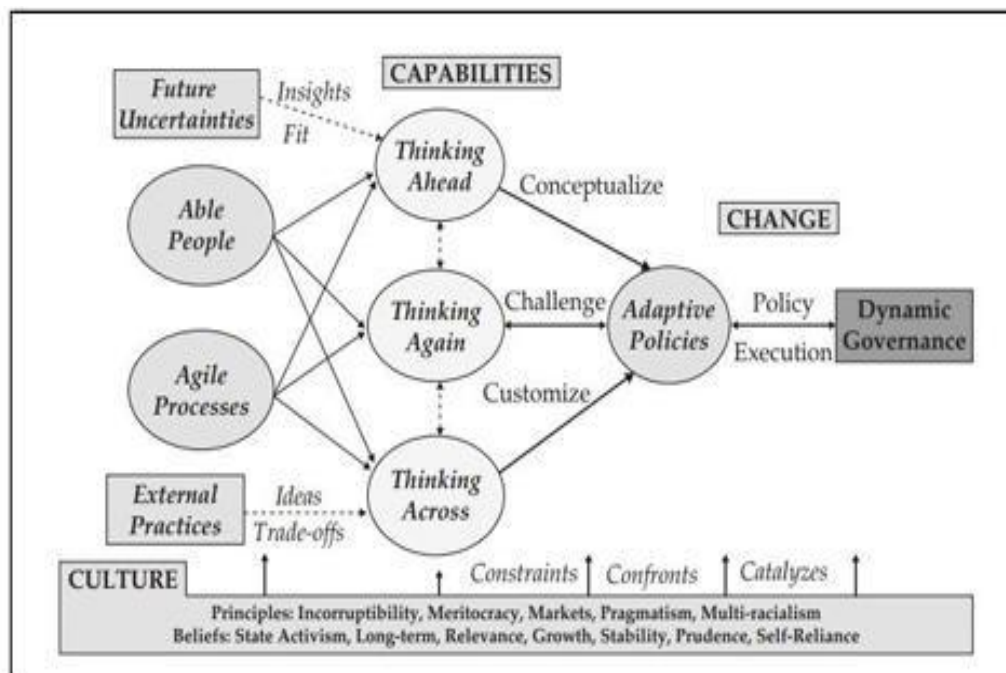
Dynamic governance dapat dipahami sebagai pendekatan pemerintah dalam mengelola kebijakan publik dan program secara adaptif terhadap kompleksitas dan percepatan perubahan lingkungan yang terus berkembang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan menjadi mekanisme responsif dalam mengatasi tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal pada institusi

pemerintahan. Konsep *dynamic governance* erat kaitannya dengan prinsip *good governance*, yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan pemerintahan yang dinamis, fleksibel, dan inovatif dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Adaptabilitas ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang suatu bangsa, sekaligus memperkuat kapasitas institusional dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dynamic governance secara mendasar berfokus pada dua elemen utama, yakni budaya organisasi (*institutional culture*) dan kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*). Kedua elemen ini berperan sebagai penggerak utama dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan proses organisasi untuk menciptakan perubahan kebijakan yang adaptif, yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep *dynamic governance*. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua komponen pendukung krusial yang berfungsi sebagai penguangkit kapabilitas dinamis, yaitu individu yang *kompeten* (*able people*) dan proses yang lincah (*agile process*). Komponen-komponen ini memfasilitasi pengembangan pola pikir strategis yang meliputi berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*), dan berpikir lintas perspektif (*thinking across*). Melalui pola pikir tersebut, organisasi dapat merumuskan kebijakan adaptif (*adaptive policies*) yang efektif dalam mengarahkan institusi menuju tata kelola yang dinamis. Konsep *dynamic*

governance sendiri merupakan hasil interaksi sistematis antara budaya institusional, kapabilitas dinamis, dan perubahan yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan (Neo & Chen, 2007).

Keberhasilan penerapan sistem ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui kepemimpinan yang terencana dan ambisius dalam membentuk interaksi sosial-ekonomi yang selaras dengan tujuan strategis. Secara keseluruhan, kerangka kerja *dynamic governance* menggambarkan bagaimana elemen-elemen kunci tersebut, beserta komponen pendukungnya, saling berinteraksi secara sinergis untuk menciptakan perubahan strategis yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan efektif dalam menghadapi dinamika lingkungan internal maupun eksternal.



Gambar 1. 4 Proses Interaksi Sistem *Dynamic governance*

Sumber: Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007)

1.6.5.1 Elemen dan Komponen Pendukung *Dynamic governance*

Dynamic governance merupakan suatu konsep yang lahir dari interaksi antara tiga elemen utama, antara lain budaya institusional (*culture*), kapabilitas dinamis (*capabilities*), dan perubahan yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan (*change*) (Neo & Chen, 2007). Implementasi sistem *dynamic governance* tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari upaya kepemimpinan yang terencana dan berorientasi pada pengembangan hubungan sosial serta ekonomi yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Kerangka kerja *dynamic governance* menggambarkan bagaimana elemen-elemen kunci tersebut, meliputi budaya institusional, kapabilitas dinamis, dan perubahan yang

diinginkan bersama dengan komponen pendukung lainnya, saling berinteraksi secara sistematis untuk mendorong terwujudnya perubahan strategis yang adaptif dan berkelanjutan. Melalui interaksi ini, tata kelola yang dinamis dapat dicapai, sehingga institusi mampu merespons lanskap internal dan eksternal yang terus berkembang dengan efektif serta efisien dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Selain tiga elemen tersebut, dalam teorinya Neo dan Chen mengungkapkan ada empat komponen pendukung (internal dan eksternal) dalam menjalankan konsep *dynamic governance*, antara lain *able people*, *agile process*, *future uncertainties*, dan *external practice*. Ketiga elemen tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. *Institutional Culture* (Budaya Institusional)

Budaya merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang, jika dikaitkan ke dalam organisasi sektor publik memiliki arti sebagai sebuah kebiasaan yang diterapkan di suatu organisasi. Budaya dapat mempresentasikan nilai-nilai dari suatu organisasi dalam menjalankan tujuan organisasi, terciptanya sebuah budaya di dalam organisasi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh pimpinan maupun para pegawainya di lingkungan organisasi (Azaria, 2023).

Budaya akan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Budaya birokrasi merupakan sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki tanda,

orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan, dan pengalaman yang diekspresikan ke dalam sikap atau tingkah laku setiap anggota dari sebuah organisasi (Huraehah, 2019).

Pemahaman lain terkait budaya suatu kelompok organisasi didefinisikan oleh (Neo dan Chen, 2007) sebagai berikut:

“Budaya birokrasi dapat mendukung atau menghambat dinamisme dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Budaya birokrasi melibatkan bagaimana proses suatu bangsa memandang posisinya di dunia, bagaimana mengekspresikan tujuannya, dan bagaimana mengembangkan nilai serta keyakinan untuk mengarahkan pengambilan keputusan dan pilihan kebijakannya.”

Budaya institusional berperan sebagai fondasi utama dalam penerapan *dynamic governance*, di mana fondasi budaya ini dibangun atas lima prinsip pokok (*principle*) yang menjadi kerangka nilai organisasi dalam menjalankan tata kelola yang dinamis dan adaptif.

Kelima prinsip tersebut meliputi:

- A. antikorupsi (*incorruptibility*);
- B. meritokrasi (*meritocracy*);
- C. orientasi pasar (*market orientation*);
- D. pragmatisme (*pragmatism*); serta
- E. multirasialisme (*multi-racialism*).

Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis dan operasional, tetapi juga membentuk identitas budaya yang kokoh dalam menghadapi tantangan serta perubahan lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut diperkuat oleh sejumlah keyakinan mendasar (*beliefs*) yang meliputi, antara lain:

- A. aktivisme negara (*state activism*);
- B. fokus jangka panjang (*long-term focus*);
- C. relevansi kebijakan dan praktik (*relevance*);
- D. pertumbuhan ekonomi dan sosial (*growth*);
- E. stabilitas institusional (*stability*);
- F. kehati-hatian dalam pengambilan keputusan (*prudence*), serta
- G. kemandirian (*self-reliance*).

Kombinasi prinsip dan keyakinan ini menciptakan sinergi yang memungkinkan institusi untuk beradaptasi secara efektif terhadap dinamika internal dan eksternal, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang berkelanjutan dan responsif dalam konteks pemerintahan modern.

Prinsip-prinsip dan keyakinan tersebut bekerja secara sinergis untuk memperkuat kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan, menjaga stabilitas institusional, serta mendorong pertumbuhan melalui penerapan kebijakan yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. Sebagai elemen budaya yang mendasar, nilai-nilai ini membentuk cara pandang individu dalam organisasi terhadap dinamika perubahan lingkungan sekaligus memandu institusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, landasan nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pilar etis, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang integral dalam pembangunan kebijakan publik yang responsif terhadap kompleksitas konstelasi global dan lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa tata kelola pemerintahan mampu

menghadirkan solusi yang efektif dan strategis demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kapabilitas (*Capabilities*)

Kapabilitas dinamis dalam konteks *dynamic governance* merujuk pada kapasitas organisasi untuk mempertahankan relevansi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks. Kapabilitas ini tercermin melalui tiga pola pikir strategis yang esensial, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. *Thinking ahead* menekankan pentingnya proyeksi masa depan dengan mengidentifikasi peluang serta ancaman potensial, sekaligus merancang strategi proaktif guna mengantisipasi dinamika yang akan datang. Selanjutnya, *thinking again* berfokus pada evaluasi kritis terhadap kebijakan yang telah diterapkan, guna memastikan kuterbaruan dan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Terakhir, *thinking across* menekankan pentingnya pembelajaran lintas sektor dan konteks, di mana organisasi mengadopsi praktik terbaik dan inovasi dari berbagai lingkungan berbeda untuk mengoptimalisasi kualitas kebijakan yang ada. Melalui integrasi ketiga pola pikir tersebut, organisasi dapat secara efektif mengelola perubahan dan meningkatkan kapasitas tata kelola yang adaptif serta berkelanjutan.

Dengan kapabilitas tersebut, organisasi tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga secara proaktif menciptakan kebijakan inovatif yang kontekstual, berbasis pada pengalaman kolektif, dan mampu

menghadapi ketidakpastian masa depan secara efektif. Kapabilitas dinamis ini menjadi inti dari tata kelola yang mendorong organisasi untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

3. Perubahan (*Change*)

Elemen perubahan (*change*) merupakan indikator utama keberhasilan dalam penerapan kebijakan adaptif, yang mencerminkan kemampuan institusi untuk merespons tantangan secara tepat dan kontekstual. Perubahan tersebut terjadi ketika kebijakan yang dirancang tidak hanya berhasil menjawab kebutuhan secara efektif, tetapi juga selaras dengan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Lebih dari sekadar penyesuaian, perubahan ini melibatkan transformasi strategis yang mendasar pada struktur organisasi, regulasi, serta pendekatan kerja yang diterapkan. Dengan memaksimalkan penerapan kebijakan adaptif, elemen perubahan memungkinkan institusi untuk secara berkelanjutan berinovasi dan merespons berbagai dinamika, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pada saat yang sama, institusi dapat mempertahankan stabilitas operasional dan komitmen terhadap tujuan jangka panjang, sehingga memastikan keberlanjutan pembangunan dan efektivitas tata kelola dalam menghadapi kompleksitas zaman.

4. Sumber Daya Manusia Kompeten (*Able people*)

Able people adalah individu-individu dalam organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, motivasi, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang relevan serta beradaptasi dengan

perubahan. *Able people* memiliki peran penting dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan masa depan melalui pemikiran strategis. Individu tersebut mampu menganalisis ketidakpastian yang ada dan mengonseptualisasi kebijakan baru yang sesuai dengan visi jangka panjang. Selain itu, *able people* juga berperan dalam menantang asumsi yang sudah ada dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

5. Proses yang Gesit (*Agile process*)

Agile processes merupakan pendekatan manajerial yang menekankan pada fleksibilitas dan responsivitas organisasi terhadap dinamika perubahan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka operasional, tetapi juga sebagai mekanisme yang memastikan keberlangsungan siklus pembelajaran, adaptasi, dan inovasi dalam organisasi. Melalui penerapan proses yang gesit, organisasi mampu melakukan refleksi terhadap pengalaman, mengidentifikasi pola dari berbagai konteks, serta merumuskan solusi yang relevan dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan internal.

Lebih jauh, *agile processes* menyediakan ruang bagi organisasi untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat statis, melainkan selalu relevan dengan perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, mekanisme ini berperan penting dalam menjaga efektivitas implementasi kebijakan sekaligus meningkatkan kapasitas adaptif organisasi. Secara konseptual, pendekatan ini tidak hanya mendukung

keberlanjutan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian, tetapi juga memperkuat kemampuan inovatif yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing di tengah kompleksitas global.

6. Ketidakpastian masa depan (*Future Uncertainties*)

Ketidakpastian masa depan merepresentasikan kondisi lingkungan eksternal yang sarat dengan perubahan cepat dan sulit diprediksi, mencakup aspek perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, hingga transformasi sosial dan budaya. Tingginya tingkat ketidakpastian menuntut organisasi untuk mengembangkan kapasitas dalam melakukan proyeksi strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan skenario. Proyeksi tersebut berfungsi sebagai instrumen penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, sehingga mampu meminimalisir risiko sekaligus mengoptimalkan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan. Dengan demikian, kemampuan organisasi dalam melakukan antisipasi strategis menjadi faktor kunci untuk menjaga relevansi, ketahanan, dan keberlanjutan kebijakan di tengah dinamika ketidakpastian global.

7. Praktik Eksternal (*External Practice*)

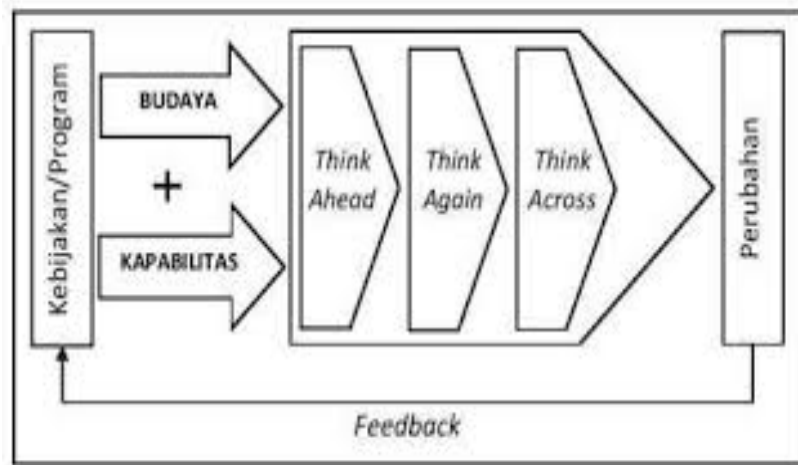
Praktik eksternal merujuk pada pengalaman, inovasi, serta solusi yang diadopsi dari berbagai konteks, termasuk praktik terbaik (*best practices*) yang berkembang di negara lain maupun lingkungan organisasi yang berbeda. Kehadiran praktik eksternal berfungsi sebagai sumber wawasan komparatif yang dapat memperkaya perspektif pembuat kebijakan,

sekaligus memberikan alternatif strategi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Lebih jauh, adopsi praktik eksternal mendorong terbangunnya kemampuan *thinking across*, yakni kapasitas untuk melihat permasalahan dari sudut pandang lintas sektor maupun lintas negara, sehingga memunculkan ide dan gagasan baru yang lebih inovatif, adaptif, dan kontekstual. Dengan demikian, praktik eksternal tidak hanya menjadi instrumen transfer pengetahuan, tetapi juga katalis bagi proses pembelajaran kebijakan dan peningkatan kualitas tata kelola.

1.6.5.2 Interaksi dan Keterhubungan Dalam Sistem *Dynamic governance*

Dynamic governance atau tata kelola dinamis merupakan suatu pendekatan tata kelola yang menekankan tidak hanya pada kapasitas untuk merespons perubahan, tetapi juga pada cara sistem tata kelola berfungsi sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Dalam kerangka ini, setiap elemen tata kelola dipahami bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai 57 bagian dari suatu jaringan interaksi yang kompleks dan saling memengaruhi. (Neo dan Chen, 2007) menegaskan bahwa sistem tata kelola dinamis dibangun atas tiga elemen utama, yaitu *culture*, *capabilities*, dan *change*, yang masing-masing memiliki peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan. Namun, esensi dari tata kelola dinamis terletak pada interaksi dan sinergi ketiga elemen tersebut. Secara individual, *culture*, *capabilities*, maupun *change* dapat memberikan dampak tertentu terhadap efektivitas tata kelola, tetapi ketika ketiganya berfungsi secara interaktif sebagai satu kesatuan sistem, maka hasil

yang dicapai akan jauh lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Dynamic governance* dapat dipandang sebagai paradigma tata kelola yang mampu memperkuat ketahanan institusi sekaligus meningkatkan kapasitas adaptifnya di tengah dinamika perubahan lingkungan.



Gambar 1. 5 Proses Interaksi Sistem *Dynamic governance*

Sumber: Neo & Chen, 2007

Dalam kerangka *Dynamic governance*, keberadaan *culture*, *capabilities*, dan *change* memiliki dampak yang terbatas apabila dijalankan secara independen. Namun, ketika ketiganya saling melengkapi dan bekerja secara sinergis, maka akan tercipta kekuatan yang lebih besar dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan. Budaya organisasi yang mendukung perubahan, apabila dipadukan dengan kapabilitas adaptif, dapat meningkatkan kapasitas sistem untuk merespons dinamika lingkungan yang penuh ketidakpastian. Lebih jauh, pola pikir kapabilitas seperti *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* menjadi instrumen penting yang mampu mengoptimalkan potensi budaya dan perubahan tersebut. Meskipun demikian, interaksi antara ketiga elemen tidak selalu menghasilkan efek

positif. Hubungan yang tidak selaras justru dapat memunculkan konflik internal dan menghambat proses peningkatan kinerja pemerintahan.

Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola dinamis sangat ditentukan oleh sejauh mana *culture*, *capabilities*, dan *change* dapat terintegrasi secara harmonis sehingga memperkuat kapasitas adaptif dan inovatif sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai interaksi dan keterhubungan antara budaya, kapabilitas, dan perubahan menjadi faktor kunci dalam membangun sistem *Dynamic governance* yang efektif. Pendekatan ini menekankan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan masing-masing elemen, tetapi oleh kemampuan elemen-elemen tersebut untuk bekerja secara terpadu dan saling memperkuat. Dengan mengedepankan integrasi dan sinergi antar elemen, *Dynamic governance* berpotensi menghasilkan solusi yang lebih komprehensif terhadap berbagai tantangan pemerintahan, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Fauzi, 2017). Dalam konteks ini, kepemimpinan sektor publik memegang peranan strategis. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memahami dinamika hubungan antar elemen tersebut, tetapi juga untuk mengelolanya secara efektif sehingga tercipta keselarasan yang mampu mengoptimalkan potensi setiap komponen. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang terbangun akan lebih tanggap, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan publik secara berkelanjutan.

1.6.5.3 *Dynamic Capability* (Kapabilitas Dinamis)

Kapabilitas atau kemampuan sangat berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh organisasi maupun sumber daya yang dimiliki organisasi. Collin mengategorikan kapabilitas ke dalam 3 bentuk yaitu statis, dinamis, serta kreatif (Huraerah, 2019). Kapabilitas dinamis yaitu kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan seiring perubahan zaman. Kapabilitas dinamis digunakan sebagai suatu manajemen strategi organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Strategi ini banyak diterapkan dalam organisasi sektor bisnis, namun berjalannya waktu kapabilitas dinamis juga dipraktikkan ke dalam organisasi sektor publik dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing kompetitif terhadap organisasi (Darusman & Wijaya, 2020).

Pemahaman lain terkait definisi kapabilitas juga dijelaskan oleh (Neo dan Chen 2007) sebagai:

(Kapabilitas mengacu pada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya organisasi yang difokuskan dalam menyusun serta melakukan tugas penting yang terkoordinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan).

Konsep kapabilitas dalam organisasi sektor publik yang diprakasai oleh (Neo & Chen, 2007) ialah berpikir kedepan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*), dan berpikir menyilang atau lintas batas (*thinking across*). Tata kelola pemerintahan yang dinamis memerlukan penerapan kemampuan dalam berpikir ke depan, berpikir ulang, serta berpikir lintas batas sebagai sebuah strategi organisasi sektor publik dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin pesat.

Menurut (Neo dan Chen, 2007) menjelaskan tentang kapabilitas dalam konsep

(Pemerintahan yang dinamis akan terjadi di kala pembuat kebijakan secara konsisten berpikir ke depan untuk melihat perubahan di sekitarnya, berpikir ulang dalam mempertimbangkan kebijakan yang sebelumnya telah dibuat, dan berpikir menyilang dengan menyerap pembelajaran dari negara atau organisasi yang lain serta secara terus menerus menambahkan persepsi baru ke dalam kebijakan maupun program untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan).

Tata kelola pemerintahan yang dinamis tidak terjadi secara langsung melainkan membutuhkan suatu proses yang lama dan terstruktur. Tata kelola dinamis dapat terbentuk apabila pimpinan di suatu organisasi publik memiliki kemampuan serta ambisi untuk menghadapi perubahan yang kompleks dengan membuat berbagai kebijakan maupun keputusan yang efektif, sehingga pimpinan di sektor publik sangat menjadi penentu untuk mewujudkan kapabilitas dinamis di organisasi publik. Kapabilitas dinamis atau kemampuan yang dinamis mendasarkan pada kegiatan meningkatkan aktivitas organisasi dimulai dari proses pembelajaran, adaptasi, perubahan, hingga proses penyempurnaan sepanjang waktu. Terdapat tiga kemampuan berpikir yang dapat membangun kapabilitas dinamis di suatu organisasi, adapun ketiga kemampuan dalam berpikir menurut (Neo dan Chen, 2007) :

1. Berpikir Kedepan (*Thinking Ahead*)

Thinking ahead merupakan kapabilitas kunci yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tren dan perkembangan potensial di lingkungan eksternal, memahami dampaknya terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi yang strategis, serta merumuskan investasi dan opsi kebijakan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang sekaligus

mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul. Tujuan utama dari *thinking ahead* bukanlah untuk melakukan prediksi pasti terhadap masa depan yang bersifat tidak pasti, melainkan untuk mendorong para pemimpin dalam melakukan diskusi strategis yang eksploratif mengenai berbagai kemungkinan skenario ke depan.

Proses ini memperkuat kemampuan pengambil keputusan dalam mengidentifikasi pola-pola keterkaitan antar peristiwa, memahami implikasi jangka panjangnya, serta secara kritis mempertanyakan asumsi-asumsi fundamental yang selama ini menjadi dasar perencanaan. Dengan demikian, *thinking ahead* merupakan landasan penting dalam membangun budaya organisasi yang terus-menerus belajar, fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan terbuka terhadap respons yang adaptif terhadap situasi yang tidak terduga, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang dinamis dan berkelanjutan. Proses *thinking ahead* melibatkan beberapa tahapan krusial yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi masa depan yang dinamis dan penuh ketidakpastian.

- 1) Eksplorasi dan antisipasi tren masa depan, khususnya tren yang berpotensi memengaruhi kebijakan publik serta pencapaian tujuan strategis organisasi.
- 2) Proses ini mencakup identifikasi dampak tren tersebut terhadap tujuan saat ini serta evaluasi efektivitas kebijakan, strategi, dan program yang telah berjalan.

- 3) Perancangan opsi strategis yang mampu mempersiapkan organisasi dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul sekaligus memanfaatkan peluang baru secara optimal.
- 4) Menuntut partisipasi aktif para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk mengakui urgensi isu-isu yang berkembang serta terlibat dalam diskusi strategis guna menyusun respons yang tepat.

Kapabilitas ini menuntut pemimpin yang peka terhadap sinyal awal masalah dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, teknologi, maupun politik. Pemimpin tersebut harus mampu memahami tren yang sedang berlangsung, mengidentifikasi berbagai skenario masa depan, serta mengartikulasikan hubungan sebab-akibat yang kompleks untuk mendukung perancangan strategi yang efektif. Lebih jauh, pemimpin juga perlu memiliki kemampuan berpikir kreatif yang kritis guna menantang asumsi-asumsi lama dan mengembangkan ide-ide inovatif yang mampu mengatasi tantangan masa depan secara proaktif. Pendekatan terstruktur ini menjadikan *thinking ahead* sebagai landasan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

2. Berpikir Kembali (*Thinking Again*)

Thinking again merupakan kapabilitas kritis yang memungkinkan organisasi untuk secara sistematis mengevaluasi realitas pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program yang sedang berjalan. Tujuan utama dari proses ini adalah mengidentifikasi kelemahan dan tidak efektif yang ada,

serta merumuskan perbaikan melalui perancangan ulang kebijakan atau prosedur untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkualitas.

Pendekatan ini mengandalkan penggunaan data empiris, umpan balik masyarakat, serta analisis mendalam untuk mengungkap akar permasalahan dan merumuskan solusi inovatif. Implementasi *thinking again* menuntut keterampilan evaluatif yang objektif, disertai keberanian untuk mempertanyakan *status quo* serta kebiasaan lama yang dapat menghambat proses pembelajaran dan inovasi organisasi. Dengan demikian, praktik berpikir ulang ini tidak sekadar berfokus pada koreksi kebijakan yang kurang efektif, tetapi juga membangun budaya dialog terbuka yang mendorong pemahaman mendalam terhadap penyebab fundamental masalah yang dihadapi, sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi dan pengembangan berkelanjutan. Proses penting, yaitu: melibatkan beberapa langkah

- 1) Menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik atau pemangku kepentingan.
- 2) Menggali penyebab mendasar dari data, fakta, atau perilaku yang diamati untuk menemukan kekurangan atau potensi perbaikan.
- 3) Meninjau ulang strategi, kebijakan, serta program untuk mengidentifikasi elemen yang berhasil dan yang perlu diperbaiki.
- 4) Merancang ulang kebijakan dan program secara sebagian atau menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan.
- 5) Melaksanakan kebijakan atau sistem baru agar masyarakat dan

pelanggan dapat menerima manfaat yang lebih baik dan bermakna.

Pada konteks tata kelola dinamis, *thinking again* bukan hanya tentang memperbaiki kebijakan, tetapi juga tentang memastikan bahwa pembelajaran terus-menerus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, organisasi dapat beradaptasi dan terus meningkatkan kualitas kebijakan serta layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Berpikir Lintas Batas (*Thinking Across*)

Kapabilitas *thinking across* merupakan kemampuan strategis yang memungkinkan organisasi untuk melampaui batas-batas tradisional serta hambatan sektoral dalam rangka mempelajari dan mengadopsi pengalaman dari organisasi lain. Kapabilitas ini tidak hanya terbatas pada peniruan atau adaptasi mekanis atas aturan dan praktik yang telah terbukti efektif, melainkan menuntut pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab keberhasilan serta mekanisme implementasi praktik tersebut. Dengan demikian, *thinking across* mendorong proses pembelajaran lintas konteks yang kritis dan reflektif, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengonstruksi kebijakan dan program inovatif yang disesuaikan secara optimal dengan karakteristik dan kebutuhan internalnya. Pendekatan ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas organisasi dalam merespons tantangan kompleks dan dinamis dengan solusi yang lebih adaptif, kreatif, dan berkelanjutan.

Proses *thinking across* melibatkan beberapa langkah penting, yakni:

- 1) Mencari praktik-praktik baru dan menarik yang telah diterapkan di tempat lain dalam mendekati masalah yang serupa.
- 2) Merefleksikan pelaksanaan kebijakan, termasuk apa yang dilakukan, bagaimana caranya, dan pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman tersebut.
- 3) Mengevaluasi relevansi praktik tersebut dengan konteks internal, dengan mempertimbangkan kondisi unik dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menemukan koneksi baru antara ide-ide yang menciptakan pendekatan inovatif permasalahan yang sedang dihadapi.
- 5) Menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan internal dan kebutuhan warga negara.

1.6.6 Faktor Pendorong dan Penghambat *Dynamic governance*

Dalam penerapan *dynamic governance*, keberhasilan suatu instansi tidak hanya ditentukan oleh kerangka kerja yang digunakan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Menurut Neo dan Chen dalam (Mayarni, 2019), terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi penerapan *dynamic governance*, yaitu:

1. Komitmen

Komitmen merupakan manifestasi kesungguhan dan dedikasi para pemimpin, baik di tingkat kepala daerah maupun lembaga pemerintah, dalam mengakselerasi perubahan yang konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan kemajuan daerah. Komitmen ini mencakup sikap proaktif dalam menyesuaikan kebijakan publik terhadap dinamika perubahan lingkungan

tanpa mengesampingkan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

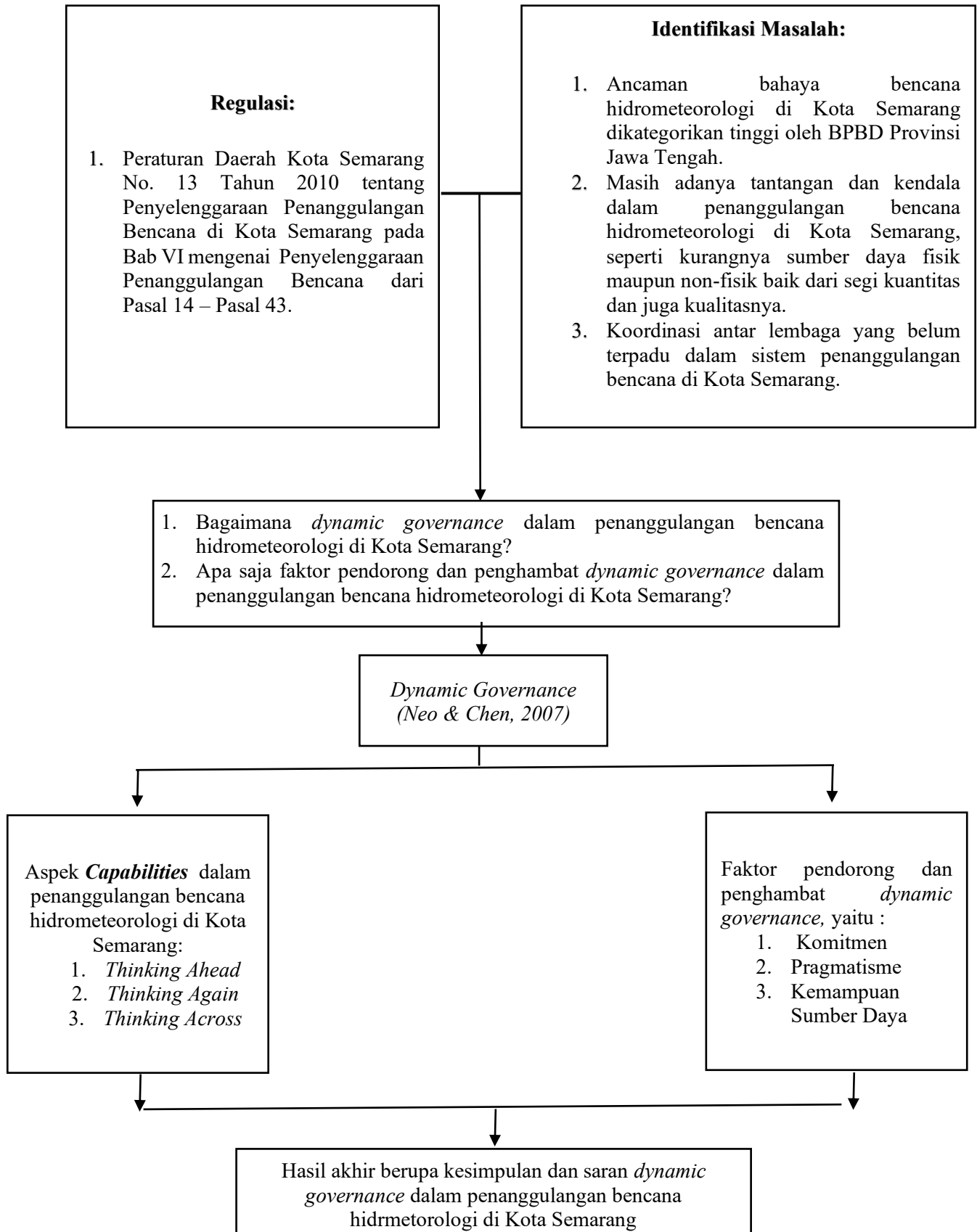
2. Pragmatisme

Pragmatisme dipahami sebagai kemampuan berpikir dan bertindak secara rasional serta berorientasi hasil, yang menekankan pencarian solusi praktis dan efektif dibanding sekadar terperangkap dalam idealisme teoritis. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dalam merespons kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan yang terus berkembang, serta mengakomodasi beragam kebutuhan masyarakat secara responsif.

3. Kemampuan Sumber Daya

Mencakup dua dimensi penting, yakni sumber daya nyata (*tangible resources*) seperti infrastruktur dan fasilitas, serta sumber daya tidak berwujud (*intangible resources*) yang meliputi kompetensi SDM, etika kerja, budaya organisasi, dan regulasi. Sinergi optimal antara kedua dimensi tersebut menjadi prasyarat esensial agar organisasi mampu memenuhi tuntutan perubahan lingkungan dengan cara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep merupakan batasan atau rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk menyesuaikan variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala yang memberi arti pada variabel tersebut. Operasionalisasi dalam penelitian ini tidak terlepas dari analisis penerapan *dynamic governance* yang digunakan untuk membantu menganalisis penanggulangan bencana. Untuk menghindari salah tafsir istilah yang digunakan dan untuk kemudahan pemahaman, beberapa konsep telah dioperasionalisasikan.

1. *Dyanamic Governance*

Dynamic govenrnance dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang adalah sebuah pendekatan tata kelola pemerintahan yang menuntut adaptasi terus-menerus terhadap perubahan lingkungan agar kebijakan dan program publik tetap efektif dalam jangka panjang dengan tujuan menanggulangi bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Analisis terhadap model *dynamic governance* ini berdasarkan perspektif (Neo dan Chen, 2007), yang mana dipandang sebagai kemampuan pemerintahan untuk terus menerus menyesuaikan kebijakan, program, serta cara penyusunan dan pelaksanaannya agar tetap relevan dan efektif alam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan tidak pasti, sehingga tujuan jangka panjang bangsa dapat tercapai.

Penerapan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang, antara lain:

A. *Capabilities*

Kemampuan dan sumber daya untuk secara proaktif dan adaptif dalam

menghadapi bencana hidrometeorologi (cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan). Kapabilitas menjadi salah satu elemen utama dalam *dynamic governance* yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007) dalam mencapai keberhasilan elemen kapabilitas ini terdiri dari:

1) *Thinking ahead* (Berpikir Ke depan)

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memprediksi perkembangan lingkungan di masa depan memahami konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi, serta menentukan strategi dan pilihan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi.

2) *Thinking again* (Berpikir Ulang/Kembali)

Kemampuan untuk secara kritis merefleksikan dan mengevaluasi kebijakan, program, dan tindakan yang sedang berjalan dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi.

3) *Thinking across* (Berpikir Lintas Batas)

Kemampuan untuk mempelajari praktik-praktik baru dan inovatif dari organisasi lain atau negara lain, merefleksikan pengalaman tersebut, menyesuaikannya dengan konteks lokal, dan mengintegrasikan ide-ide baru untuk menciptakan solusi inovatif terhadap penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

Merupakan komponen yang menjadi penggerak dalam proses *dynamic governance*. *Dynamic governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara

lain:

1) Komitmen

Kesungguhan dan dedikasi para pemimpin, baik dari tingkatan paling bawah sampai ke atas, dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dan konsisten terhadap kemajuan daerah.

2) Pragmatisme

Kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara praktis, berorientasi pada hasil, dan berfokus pada solusi nyata daripada hanya terjebak dalam idealisme semata.

3) Kemampuan Sumber Daya

Kemampuan sumber daya yang mencakup, sumber daya secara fisik maupun non fisik yang digunakan sebagai alat bagi organisasi untuk memenuhi tuntutan akan perubahan dengan cara efektif dan juga efisien.

Tabel 1. 4
Tabel Fenomena

Konsep	Fenomena	Sub Fenomena
<i>Dynamic governance</i>	<i>Thinking ahead</i>	<i>Exploring and anticipating</i>
		<i>Perceiving and testing</i>
		<i>Strategizing</i>
		<i>Influenzing</i>
	<i>Thinking again</i>	<i>Understanding and probing</i>
		<i>Reviewing and analyzing</i>
		<i>Redisgning</i>
		<i>Implementing</i>
	<i>Thinking across</i>	<i>Searching and reserching</i>
		<i>Reflecting</i>
		<i>Evaluating</i>
		<i>Discovering</i>
		<i>Customizing</i>

Konsep	Fenomena	Sub Fenomena
	Faktor Pendorong dan Penghambat	Komitmen
		Pragmatisme
		Kemampuan sumber daya

Sumber: data diolah oleh peneliti (2025)

1.9 Argumen Penelitian

Tingginya potensi bahaya bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Semarang, memberikan tanda bahwa Kota Semarang harus mempunyai kebijakan dan juga manajemen penanggulangan bencana yang optimal. Namun sistem penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Kota Semarang dalam Renstra BPBD Kota Semarang Tahun 2021-2026 masih terdapat tantangan yang menghambat sistem penanggulangan bencana. *Dynamic governance* memberikan kerangka kerja yang dinamis, fleksibel, dan adaptif di era dan juga masa depan yang penuh ketidakpastian *uncertainty future*.. Sehingga bencana hidrometeorologi yang menjadi ancaman bagi Kota Semarang dapat ditangani dengan lebih responsif seperti disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan yang diinginkan oleh publik (*public interst*). Konsep *dynamic governance* Neo dan Chen menyatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang dinamis dapat dilihat ketika bagaimana pemerintah melakukan tindakan pencegahan hingga adanya tindakan kontinuitas dalam menghadapi keadaan atau fenomena yang menyebabkan munculnya *uncertain future*. Untuk itu analisis konsep *dynamic governance* sebagai bentuk keseriusan dari pemerintah dalam menghadapi bencana

hidrometeorologi sebagai akibat perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi, diperlukan pemerintahan yang dinamis yang selalu dapat melihat kebutuhan masyarakat.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2020), Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu proses eksplorasi dan memahami makna perilaku yang ada pada suatu kelompok maupun individu, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses dalam penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada *setting* partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Tujuan dari dilakukannya penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman, perilaku, persepsi. Tindakan motivasi yang dialami oleh subjek dengan mendeskripsikan secara rinci (Moleong, 2017). Selain itu, menurut (Sugiyono, 2020) terdapat karakteristik yang membedakan aksioma antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yaitu:

Tabel 1. 5
Perbedaan Aksioma Antara Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif

Aksioma Dasar	Metode Kuantitatif	Metode Kualitatif
Sifat realitas	Tunggal, konkrit, teramati	Ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman
Hubungan penelitian yang diteliti	Independen	Interaktif tidak dapat dipisahkan
Hubungan variabel	Sebab akibat (klausal) X-Y	Timbal balik/interaktif/ X-Y-X (saling mengulang)
Kemungkinan generalisasi	Cenderung membuat generalisasi	<i>Transferability</i> (hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu)
Peranan nilai	Cenderung bebas nilai	Terikat nilai

Sumber: (Sugiyono, 2020)

Berbentuk tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mampu memberikan gambaran dengan jelas, luas, mendalam, dan terperinci tentang fenomena atau permasalahan yang akan diteliti, sehingga nantinya akan memudahkan peneliti dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan deskripsi terhadap data-data yang didapatkan menggunakan teks yang didukung dengan gambar, tabel, grafik, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kebenaran data tersebut. Maka dari itu, data yang didapatkan harus diuji secara triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu guna memperoleh kredibilitas, *transferability*, *auditability* dan *cofirmability*. Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan menggambarkan fenomena-fenomena yang akan dilakukan. Selain itu, juga mempermudah peneliti

untuk memahami secara mendalam tentang konsep *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang, sehingga peneliti dapat memahami realitas secara holistik berkaitan dengan fenomena yang akan peneliti lakukan.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi lokal di mana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020). Lingkup penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spredley dalam (Sugiono, 2020) dapat digunakan pada *scope* paling kecil, yaitu satu situasi sosial tunggal sampai masyarakat luas. Temuan dalam penelitian kualitatif bisa yang sederhana sampai yang kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau besar Sussan Stainback dalam (Sugiyono, 2020).

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian dilakukan pada tempat operasionalisasi penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang. Di Kota Semarang sendiri organisasi atau dinas yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang. Tugas pokok dan juga fungsi dari BPBD Kota Semarang sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana dari pra-bencana, masa bencana, dan pasca bencana tertuang dalam Perwal No. 122 Tahun 2021. Selain itu, peneliti juga akan melakukan penelitian di daerah di Kota Semarang yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti

di Kelurahan Kaligawe dan Tambakrejo.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai objek, hal, atau individu yang menjadi sumber data terkait dengan fenomena penelitian yang akan dilakukan, di mana subjek tersebut berperan sebagai fokus utama dari permasalahan maupun potensi yang akan dikaji (Sugiyono, 2020). Pemilihan subjek penelitian memegang peranan krusial dalam keberhasilan suatu studi, karena proses pengumpulan data di lapangan harus selaras dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seleksi subjek penelitian perlu dilakukan secara cermat dan sistematis. Teknik pengambilan sampel menurut (Sugiyono, 2020) dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Pada penelitian ini, akan menggunakan teknik sampling *nonprobability*. Teknik sampling peneliti pakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive* sampling dan *snowball* sampling. Purposive sampling ini dipilih karena memungkinkan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria khusus yang relevan dengan konteks dan fenomena yang menjadi objek kajian yang diteliti, yaitu tentang konsep *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang. Pendekatan purposive sampling menjadi penting dalam situasi di mana tidak semua subjek memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memberikan informasi yang valid dan mendalam sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Selain itu, teknik ini menitikberatkan

pada pemilihan sumber data primer dan sekunder yang mampu memberikan jawaban yang komprehensif dan akurat terhadap pertanyaan penelitian, sehingga memperkuat kredibilitas dan *auditability/reliabilitas* temuan studi.

Snowball sampling, yaitu pengambilan data yang pada awalnya memiliki jumlah informan sedikit, tetapi bertambah banyak karena informan terdahulu merekomendasikan orang lain yang relevan. Informan memberikan rekomendasi informan lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan fenomena yang akan dikaji. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Seperti subjek utama dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, serta instansi- instansi terkait dan subjek pendukung penelitian seperti masyarakat yang terdampak dengan bencana hidrometeorologi. Jumlah informan akan berkembang selama di lapangan dan pengambilan data akan dihentikan jika data sudah jenuh.

Tabel 1. 6
Kriteria Informan

No.	Informan	Kriteria Informan
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang	1. Menguasai atau memahami upaya penanggulangan bencana hidrometeorologi 2. Terlibat langsung dalam upaya meminimalisir terjadinya bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. 3. Ketersediaan informan di lapangan. 4. Merasakan dampak dari
2.	Kasubag Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Semarang	
3.	Kasubag Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang	
4.	Kepala Bidang PUSDALOP (Pusat Pengendalian Operasi) BPBD Kota Semarang	
5.	Kasubag Bidang Pencegahan dan	

No.	Informan	Kriteria Informan
	Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang	bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. 5. Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan bahasa sendiri.
6.	KSB (Kelurahan Siaga Bencana) dan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana) Kelurahan Kaligawe	
7.	KSB (Kelurahan Siaga Bencana) dan KATANA (Kelurahan Tangguh Bencana) Kelurahan Tambakrejo	
8.	Masyarakat Kelurahan Kaligawe	

Sumber: Data diolah oleh penulis (2025)

1.10.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan umumnya berupa teks yang meliputi kata-kata tertulis, dokumen, frasa, atau simbol yang menjelaskan fenomena dan tindakan yang terjadi selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2020). Data ini dapat berbentuk hasil wawancara atau transkrip wawancara, catatan lapangan, foto dokumentasi, serta arsip atau dokumen pribadi yang relevan dengan konteks studi. Karakteristik deskriptif penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai penerapan konsep *dynamic governance*, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Pendekatan ini memungkinkan perolehan temuan yang komprehensif dan kontekstual, yang mampu menggambarkan secara rinci dinamika serta implementasi prinsip-prinsip tata kelola dinamis dalam meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang ada di Kota Semarang.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data merujuk pada berbagai jenis informasi yang dihasilkan dari subjek penelitian dan menjadi tempat data tersebut dapat diakses oleh peneliti. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2020).

1. Data Primer Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2020). Peneliti akan mengumpulkan data secara langsung yang didapatkan dari sumber primer atau dari tempat penelitian dilakukan, yaitu BPBD Kota Semarang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. *Actor* / orang

Actor akan memberikan tanggapan terhadap permasalahan maupun potensi yang ada dan memberikan informasi yang dimilikinya. Seluruh ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh informan memiliki arti penting bagi peneliti sehingga perlu dilakukan pencatatan, perekaman, dokumentasi foto, dan pengamatan dengan cermat. Informan dalam penelitian ini, antara lain Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, Kasubag Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Semarang, Kasubag Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Kota Semarang.

2. *Activity* / Aktivitas

Aktivitas atau peristiwa, melalui peristiwa tertentu maka peneliti

akan mengetahui aktivitas yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh subjek penelitian, yang ada di BPBD Kota Semarang.

3. *Place* / Lokasi

Lokasi penelitian, merupakan kondisi atau peristiwa dan aktivitas dapat diperoleh melalui tempat penelitian yang akan dikaji, yaitu BPBD Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni sumber data yang berasal dari sumber lain atau tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2020). Data sekunder dikumpulkan untuk melengkapi sumber data primer dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

1. Artikel jurnal dan situs web yang memiliki keterkaitan dengan data bencana maupun data tentang penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, baik di tingkat lokal sampai nasional.
2. Dokumen, memberikan informasi yang spesifik dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Misalnya, dokumen resmi berupa peraturan kebijakan, susunan organisasi, surat keputusan, serta arsip-arsip lainnya yang dapat mendukung penelitian mengenai penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang menggunakan model *dynamic governance* yang dikemukakan oleh

Neo dan Chen.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi sebagai bentuk kombinasi metode untuk meningkatkan keabsahan data. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi metode-metode berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*in depth interview*), yaitu wawancara yang terbuka, bebas, dan lebih interaktif dengan tetap berpedoman pada panduan wawancara. Selain itu, wawancara mendalam bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih dalam dan memperkaya data mengenai pandangan, pengalaman, nilai, dan persepsi informan terhadap fenomena yang diteliti mengenai penerapan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti dan akan datang langsung ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan beberapa *stakeholder* lain. Selain itu, wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berada di luar sektor pemerintahan guna memastikan bahwa hasil penelitian ini bersifat objektif.

2. Observasi

Observasi adalah teknik dari pengumpulan data yang digunakan untuk

mengamati berbagai tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, ataupun respons dari tiap individu dalam suatu penelitian yang akan diteliti. Dalam konteks ini penelitian ini akan melakukan observasi terus terang atau tersamar terhadap situasi sosial yang ada, seperti *actor*, *activity* dan *place* Spradley dalam (Sugiyono, 2020). Komponen situasi sosial yang akan diteliti, antara lain:

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan berupa gambar atau tulisan yang digunakan sebagai data dari wawancara dan observasi dalam menganalisis penerapan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Pada proses pendokumentasian, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan yang antara lain adalah buku, jurnal, artikel, dan makalah dari penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sesuai pada bidang kajiannya, para peneliti memilih dan juga menyusun dokumen-dokumen yang sudah mereka kumpulkan.

4. Triangulasi

Triangulasi data yang akan peneliti lakukan bukan tanpa alasan karena selain mengumpulkan data di sini peneliti juga sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan dari berbagai sumber data.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilakukan saat

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan diputuskan. Sedangkan interpretasi data yaitu upaya yang dilakukan untuk memperoleh makna yang lebih dalam dan luas dari hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara menelaah secara kritis temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan serta informasi akurat yang diperoleh dari lapangan Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2017).

Analisis data dilakukan setelah mengumpulkan semua data baik secara primer dan sekunder dan data yang dihasilkan berdasarkan teknik wawancara informan secara lisan maupun secara tertulis. Analisis data dibagi menjadi dua jenis yaitu analisis deskriptif dan analisis sebab akibat dan hubungan antar variabel. Analisis deskriptif berguna untuk menunjukkan kondisi atau letak suatu subjek pada waktu tertentu. Sedangkan analisis sebab akibat yaitu analisis yang meneliti bagaimana pengaruh yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini lebih didasarkan pada analisis deskriptif yang mengkaji suatu fenomena. Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) menjelaskan tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Datta Collection*)

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan konsep *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi (pengamatan) untuk memahami fenomena secara langsung, wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi dari informan kunci, dokumentasi untuk memperoleh data tertulis maupun arsip yang relevan, serta triangulasi sebagai teknik verifikasi untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Reduksi data (*data reduction*).

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data bertujuan untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian sehingga memudahkan dalam melakukan analisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, peneliti hanya menggunakan data yang relevan dengan analisis penerapan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi yang ada di Kota Semarang.

3. Penyajian data (*data display*)

Proses menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya. Tahapan ini bertujuan agar data yang ditampilkan mudah dipahami. Data yang disajikan dalam penelitian ini didasarkan pada temuan peneliti yang ada di lapangan yang digunakan untuk menjelaskan teori yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu *dynamic governance*.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang ditemukan di lapangan sehingga menjawab permasalahan penelitian secara kredibel. Tahapan ini berusaha untuk menyajikan temuan baru yang belum pernah ada di penelitian sebelumnya. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap temuan dan juga hasil data guna mendapatkan kesimpulan yang kredibel dan tidak menimbulkan bias.

1.10.8 Kualitas Data

Kriteria kualitas dan keabsahan data, dalam metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2020) meliputi uji kredibilitas data. Adanya pengujian ini dalam penelitian diharapkan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh data yang valid. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data, terkait dengan analisis *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang, antara lain:

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas ini berkenaan dengan tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang akan peneliti lakukan (Sugiyono, 2020). Uji kredibilitas data yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini meliputi:

A. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti di sini peneliti kembali ke situs penelitian/ lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun dengan yang baru. Adanya perpanjangan pengamatan diharapkan dapat menimbulkan rapor, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga informasi yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber tidak ada yang disembunyikan lagi. Peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan terhadap data yang telah diperoleh tentang konsep *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang. Perpanjangan pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti akan dibuktikan dengan melampirkan surat perpanjangan pengamatan yang dilampirkan di bab lampiran.

B. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2020). Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data terkait dengan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang salah atau tidak, dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Hak yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara membaca referensi

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, yaitu terkait dengan *dynamic governance* dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kota Semarang.

C. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu William Wiersma dalam (Sugiyono, 2020). Maka dari itu, salah satu cara untuk menguji validitas dan kredibilitas data kualitatif dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lakukan dengan triangulasi, yaitu memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, digunakan untuk memeriksa kredibilitas data contohnya diperoleh dari bawahan, atasan, dan rekan kerja yang berbeda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu instansi yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang. Instansi atau organisasi yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang adalah BPBD Kota Semarang. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber data diperoleh dari wawancara yang akan peneliti lakukan dengan Kepala Pelaksana Harian Badan BPBD Kota Semarang, Kasubag Bidang yang ada di BPBD Kota

Semarang, dan Staff BPBD Kota Semarang.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memverifikasi data yang sama menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Misalnya, informasi yang diperoleh dari wawancara dapat dikonfirmasi melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner yang berkaitan dengan penanggulangan bencana hidrometeorologi menggunakan pendekatan *dynamic governance* dari Neo dan Chen. Jika ditemukan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran data tersebut atau menerima sudut pandang yang beragam.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu pengumpulan data pada waktu atau situasi yang berbeda untuk menguji apakah hasil penelitian tetap konsisten. Perbedaan dalam waktu pengumpulan data juga berpengaruh terhadap validitas dan keandalan informasi yang diperoleh.